



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KAMIS, 31 MEI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Soal Penerimaan WTP, Kepala Daerah Harus Berkomitmen

RBI, BENGKULU - Hari ini Kamis (31/05) Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu akan menerima Laporan Hasil Penilaian (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Bengkulu. Terkait hal ini, Pemprov sendiri diketahui sudah beberapa tahun ini

hanya mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian. Untuk mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian ini, harus melewati proses yang baik tentunya selain didukung dengan Sumber Daya Manusia dan juga Kepala Daerah nya harus berkomitmen.

Menurut Kasubbag Humas Badan Pemeriksaan RI, Romy Setio beberapa permasalahan di beberapa Kabupaten bahkan Kota Bengkulu tidak menerima WTP ini terkait permasalahan keuangan pada aset. Bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan aset tersebut. "Tak hanya itu, permasalahan pembayaran sistem pengendalian intern. Terkait barang dan jasa bagaimana apakah ada kerugian. Selain itu akan kita kategori pemborosan akan mempengaruhi predikat ini.

Tentunya hal ini tuga ini menjadi catatan dan kerugian harus dikembalikan. Selain itu denda , ada proyek selesai dengan jangka waktu, namun dalam pekerjaan itu masih menyelesaikan waktu volume bangunan itu," pungkasnya kemarin Rabu (30/05) ke Harian RADAR BENGKULU.

Selain itu jika suatu daerah tersebut memang masih mendapatkan WDP, maka Romy menambahkan, akan dilihat dari hasil rekomendasi dari sebelumnya.

"Bisa meminta untuk memperbaiki setoran keuangan daerah tersebut. Apa yang harus diperlukan oleh daerah tersebut dalam action plan atau rencana pembangunan kedepannya. Namun terkadang dari pemerintah daerah itu sendiri, tidak menindaklanjuti rekomendasi ini," tambahnya.

Terakhir dirinya mengatakan, untuk perbaikan agar daerah mendapatkan predikat WTP yakni harus dukungan komitmen dari Kepala Daerah itu sendiri. Hingga adanya kesinambungan bersama stakeholder, tak terlepas dari itu pun Sumber Daya Manusia sangat diperlukan.

"Untuk perbaikan selanjutnya, yang utama itu diperlukan komitmen dari kepala daerah itu sendiri. Jika jajarannya sudah ada komitmen, namun kepala daerah hanya diam maka akan susah. Namun harus juga ada dukungan stakeholder seperti dari Anggota DPRD setempat. Selain itu didukung dari SDM. Jika semua hal ini tidak ada, maka akan kurang maksimal. Memang jika dilihat beberapa daerah biasanya, minimnya dukungan dari Sumber Daya Manusia nya," pungkasnya. (Cw1)